

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Apakah 5 Persen Sudah Cukup?

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



Rudy C Tarumingkeng: *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Apakah 5
Persen Sudah Cukup?*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

3 Maret 2026

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: APAKAH 5 PERSEN SUDAH CUKUP?

Pendahuluan

Pertanyaan “**apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen sudah cukup?**” tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh inti dari debat pembangunan Indonesia hari ini. Secara sepintas, angka 5 persen terlihat baik. Banyak negara berkembang akan menganggapnya sebagai capaian yang sehat, apalagi dalam situasi global yang tidak stabil. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh **5,11 persen**, lebih tinggi dibanding 2024 yang tumbuh **5,03 persen**. Nilai PDB atas dasar harga berlaku mencapai **Rp23.821,1 triliun**, sementara PDB per kapita sekitar **Rp83,7 juta** atau **US\$5.083,4**. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa tumbuh paling tinggi, yakni **7,03 persen**. Data ini memberi pesan awal yang jelas: ekonomi Indonesia masih bergerak, bahkan ketika dunia tidak sedang ramah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Tetapi dalam ekonomi pembangunan, ukuran “cukup” tidak pernah hanya ditentukan oleh satu angka pertumbuhan. Pertumbuhan 5 persen bisa dinilai cukup bila tujuan kita hanya menjaga stabilitas, menghindari resesi, dan secara perlahan menurunkan kemiskinan. Namun angka yang sama bisa dinilai belum cukup bila tolok ukurnya adalah **naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi, memperluas kelas menengah, menciptakan pekerjaan berkualitas, dan menghindari jebakan pendapatan menengah**. IMF dalam kajian terbarunya menilai bahwa untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045, Indonesia memerlukan pertumbuhan riil tahunan sekitar **5,3 persen**

dalam skenario dasar, dan bahkan bisa sekitar **6,3 persen** bila asumsi eksternal kurang menguntungkan. Sementara dokumen World Bank terkait visi "Golden Indonesia 2045" menyebut sasaran pertumbuhan tahunan yang dipercepat berada pada kisaran **6–8 persen**, serta menegaskan bahwa hal itu memerlukan pembalikan tren pelemahan produktivitas. ([IMF](#))

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan "apakah 5 persen sudah cukup?" tidak bisa berupa ya atau tidak secara mutlak. Jawaban yang lebih jujur adalah: **5 persen cukup untuk bertahan, tetapi belum tentu cukup untuk melompat**. Ia cukup untuk menjaga Indonesia tetap stabil di tengah guncangan global. Ia cukup untuk membuat ekonomi tidak jatuh ke dalam krisis. Ia cukup untuk memberi ruang bagi penurunan pengangguran dan kemiskinan secara bertahap. Tetapi 5 persen kemungkinan belum cukup bila Indonesia sungguh ingin mempercepat transformasi struktural, memperkuat produktivitas, dan mencapai ambisi besar 2045 dengan basis pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi. Argumen itulah yang akan saya uraikan dalam esai ini. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

1. Apa arti pertumbuhan 5 persen dalam konteks Indonesia?

Dalam banyak diskusi publik, pertumbuhan ekonomi 5 persen sering diperlakukan seolah-olah memiliki makna tunggal. Padahal, angka itu harus dibaca dalam konteks. Pertumbuhan 5 persen di negara yang sedang mengalami krisis fiskal, hiperinflasi, atau konflik tentu luar biasa. Tetapi pertumbuhan 5 persen di negara besar yang sedang mengejar status maju bisa berarti lain. Indonesia adalah ekonomi besar, berpenduduk sangat banyak, dan memiliki aspirasi historis yang jauh lebih besar daripada sekadar stabil. Karena itu, makna 5 persen di Indonesia harus selalu dikaitkan dengan tujuan pembangunan jangka panjangnya. ([World Bank](#))

Secara historis, Indonesia memang punya rekam jejak pertumbuhan yang cukup kuat. Dokumen World Bank 2025 mencatat bahwa ekonomi

Indonesia tumbuh rata-rata **5,5 persen per tahun antara 2000 dan 2023**. Rekam jejak ini membantu Indonesia mengurangi kemiskinan ekstrem dan mencapai status **upper-middle-income** pada 2023. Artinya, pertumbuhan di kisaran 5 persen bukan sesuatu yang baru; ia sudah menjadi semacam “jalur tengah” pertumbuhan Indonesia selama bertahun-tahun. Di satu sisi, ini menunjukkan ketahanan. Di sisi lain, ia juga menyiratkan bahwa pertumbuhan sekitar 5 persen belum otomatis membawa Indonesia keluar dari persoalan struktural yang lebih dalam. ([World Bank](#))

Karena itu, 5 persen bisa dibaca sebagai **angka aman**, tetapi juga bisa dibaca sebagai **angka yang mulai menjadi plafon**. Ia aman karena mampu menjaga ekonomi tetap berkembang tanpa ketegangan makro yang berlebihan. Namun ia mulai tampak seperti plafon ketika kita melihat bahwa Indonesia masih bergulat dengan kualitas pekerjaan, kedalaman industri, produktivitas yang melemah, dan ketimpangan wilayah. Di sinilah debat tentang “cukup atau tidak” menjadi penting. Dalam ekonomi, persoalan besar sering bukan terletak pada apakah suatu angka itu buruk, melainkan apakah angka yang tampak baik itu cukup untuk menjawab tantangan zaman. ([World Bank](#))

2. Mengapa 5 persen tampak cukup?

Ada argumen kuat mengapa banyak pihak menganggap pertumbuhan 5 persen sudah cukup baik, setidaknya untuk fase sekarang. Pertama, lingkungan global saat ini memang sedang tidak ideal. IMF memproyeksikan pertumbuhan global **3,3 persen pada 2026** dan **3,2 persen pada 2027**, sementara OECD memperkirakan perlambatan ke **2,9 persen pada 2026**. WTO juga menilai prospek perdagangan global 2026 memburuk akibat tarif yang lebih tinggi dan ketidakpastian kebijakan dagang. Dalam konteks dunia seperti ini, kemampuan Indonesia menjaga pertumbuhan di atas 5 persen memang pantas dipandang sebagai pencapaian. Negara tidak sedang berlari di lintasan datar; ia sedang berlari melawan angin. ([IMF](#))

Kedua, pertumbuhan 5 persen saat ini ditopang oleh fondasi domestik yang relatif kuat. IMF menilai pertumbuhan Indonesia diperkirakan tetap **5,1 persen pada 2026**, meskipun lingkungan eksternal menantang, berkat dukungan kebijakan fiskal dan moneter. Bank Indonesia juga mempertahankan **BI-Rate 4,75 persen** pada Februari 2026 sambil menekankan stabilitas rupiah dan dukungan terhadap pertumbuhan. Cadangan devisa pada akhir Januari 2026 berada di **US\$154,6 miliar**, setara **6,3 bulan impor** atau **6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah**. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Indonesia tidak berdiri di atas fondasi yang rapuh. Ia ditopang oleh kebijakan yang cukup kredibel dan bantalan eksternal yang masih kuat. ([IMF](#))

Ketiga, pertumbuhan sekitar 5 persen masih berkorelasi dengan perbaikan sosial. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 sebesar **4,74 persen**, turun dari Agustus 2025, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai **147,91 juta orang**. Rata-rata upah buruh tercatat **Rp3,33 juta**. Di sisi lain, persentase penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi **8,25 persen**. Ini berarti pertumbuhan yang ada sekarang belum terputus dari penciptaan kerja dan penurunan kemiskinan. Dalam ukuran politik-ekonomi jangka pendek, hal ini penting sekali. Pertumbuhan yang tidak menetes sama sekali ke pasar kerja tentu jauh lebih problematik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Keempat, investasi juga masih hidup. Kementerian Investasi/BKPM melaporkan realisasi investasi 2025 mencapai **Rp1.931,2 triliun**, tumbuh **12,7 persen** secara tahunan, dengan investasi hilirisasi melonjak **43,3 persen**. Artinya, dunia usaha belum kehilangan kepercayaan pada Indonesia. Dalam banyak negara, pertumbuhan 5 persen bisa jadi tampak tinggi tetapi sesungguhnya rapuh karena investasi mandek. Di Indonesia, setidaknya saat ini, investasi masih tumbuh cukup kuat. Hal itu memberi alasan tambahan bagi mereka yang berpendapat bahwa 5

persen masih merupakan tingkat pertumbuhan yang sehat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Jadi, bila kriteria kita adalah **stabilitas, ketahanan, dan perbaikan sosial bertahap**, maka 5 persen dapat dikatakan cukup baik. Ia cukup untuk menjaga kepercayaan pasar. Ia cukup untuk menghindari lonjakan pengangguran. Ia cukup untuk memberi ruang fiskal dan moneter tetap bekerja. Ia juga cukup untuk mempertahankan narasi bahwa Indonesia masih merupakan salah satu ekonomi yang relatif tangguh di Asia. Dalam pengertian ini, 5 persen adalah angka yang “cukup” untuk **bertahan dengan terhormat**. ([IMF](#))

3. Tetapi mengapa 5 persen kemungkinan belum cukup?

Di sinilah inti perdebatan sebenarnya muncul. Pertumbuhan 5 persen mungkin cukup untuk stabilitas, tetapi belum tentu cukup untuk transformasi. Argumen pertama datang dari target jangka panjang Indonesia sendiri. Menurut dokumen World Bank 2025, visi “Golden Indonesia 2045” menargetkan pertumbuhan tahunan **6–8 persen** untuk membantu Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah. Dokumen itu juga menekankan bahwa untuk mempertahankan laju setinggi itu, Indonesia harus membalik tren pelemahan pertumbuhan produktivitas yang turun dari **2,3 persen menjadi 1,2 persen antara 2011 dan 2024** serta memperbaiki imbal hasil investasi. Jika ukuran kita adalah ambisi resmi jangka panjang, maka 5 persen tampak berada di bawah laju yang diharapkan. ([World Bank](#))

Argumen kedua datang dari IMF. Dalam *Selected Issues* Januari 2026, IMF menghitung bahwa untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045, Indonesia memerlukan pertumbuhan riil tahunan sekitar **5,3 persen** selama dua dekade ke depan dalam skenario dasar. Dalam asumsi yang kurang menguntungkan, kebutuhan itu bisa naik menjadi **6,3 persen**. IMF juga menegaskan bahwa investasi publik saja tidak akan cukup; dibutuhkan reformasi struktural yang luas, perbaikan produktivitas yang berkelanjutan, pembangunan modal manusia, dan

penguatan iklim usaha. Jadi, bahkan menurut simulasi yang cukup hati-hati, pertumbuhan 5 persen kemungkinan berada **sedikit di bawah** kecepatan yang dibutuhkan untuk mengejar target 2045. ([IMF](#))

Argumen ketiga adalah soal **kualitas pekerjaan dan pendapatan**. World Bank menegaskan bahwa Indonesia dapat membuka pertumbuhan yang lebih cepat dan **better jobs** bila fokus bergeser ke reformasi yang mendukung dunia usaha dan stabilitas regulasi. Masalahnya, banyak pekerjaan yang tercipta saat ini masih berada di sektor bernilai tambah rendah, dan dokumen World Bank lain menyoroti bahwa pertumbuhan upah riil masih lemah. Ini penting, sebab 5 persen pertumbuhan tidak akan terasa “cukup” bagi masyarakat bila ia tidak menghasilkan pekerjaan dengan pendapatan yang benar-benar meningkat. Dalam perspektif rumah tangga, pertanyaan “cukup atau tidak” sering tidak dijawab oleh PDB, melainkan oleh apakah penghasilan lebih cepat naik daripada biaya hidup. ([Open Knowledge World Bank](#))

Argumen keempat adalah soal **struktur ekonomi**. Pertumbuhan 5 persen bisa datang dari beberapa kombinasi: konsumsi rumah tangga, ekspor komoditas, belanja pemerintah, atau investasi tertentu. Tetapi tidak semua sumber pertumbuhan punya kualitas yang sama. Bila 5 persen itu terutama ditopang konsumsi dan komoditas, maka ia lebih mudah goyah ketika harga dunia berubah atau daya beli menurun. Sebaliknya, bila ia ditopang produktivitas, manufaktur yang naik kelas, jasa modern, dan investasi yang memperdalam kapasitas nasional, maka 5 persen akan jauh lebih bernilai. Dengan kata lain, pertanyaan yang benar bukan hanya “berapa persen pertumbuhan?”, tetapi juga “pertumbuhan dari mana dan menghasilkan apa?” ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Argumen kelima adalah **demografi dan jendela waktu**. Indonesia masih menikmati bonus demografi, tetapi bonus ini tidak berlangsung selamanya. Negara yang ingin naik ke tingkat pendapatan tinggi biasanya harus memanfaatkan fase ketika angkatan kerja produktif

masih besar dan rasio ketergantungan masih cukup menguntungkan. Bila Indonesia terlalu lama nyaman di kisaran 5 persen tanpa lonjakan produktivitas, maka bisa saja ia memasuki tahap penuaan sebelum benar-benar menjadi negara berpendapatan tinggi. Ini inti dari kekhawatiran “middle-income trap”: bukan sekadar pertumbuhan yang rendah, tetapi pertumbuhan yang **tidak cukup cepat pada waktu yang tepat**. ([World Bank](#))

Karena itu, saya cenderung pada jawaban berikut: **5 persen belum cukup bila Indonesia ingin mengubah sejarah ekonominya secara menentu**. Ia cukup untuk mengelola hari ini, tetapi belum tentu cukup untuk memenangkan masa depan. ([World Bank](#))

4. Apakah masalahnya hanya soal angka?

Tidak. Salah satu kekeliruan umum dalam diskusi publik adalah menyederhanakan pembangunan menjadi perlombaan angka pertumbuhan. Seolah-olah bila Indonesia bisa mendorong pertumbuhan ke 6 persen atau 7 persen, semua masalah otomatis selesai. Pandangan ini terlalu sederhana. Pertumbuhan yang tinggi tetapi rapuh, timpang, atau buruk kualitasnya juga dapat menimbulkan masalah serius. Karena itu, ketika kita mengatakan 5 persen belum tentu cukup, kita tidak otomatis mengatakan bahwa “yang penting naikkan angka secepat mungkin.” Yang dibutuhkan adalah **pertumbuhan yang lebih tinggi sekaligus lebih berkualitas**. ([Open Knowledge World Bank](#))

Mari kita lihat analogi sederhana. Seorang mahasiswa bisa mendapat IPK 3,00 dan dinilai cukup untuk lulus. Tetapi bila ia ingin memperoleh beasiswa doktoral di universitas top dunia, IPK 3,00 mungkin belum cukup. Apakah solusinya sekadar menaikkan angka apa pun caranya? Tidak. Solusinya adalah memperbaiki kualitas belajar, ketajaman analisis, portofolio penelitian, dan kompetensi bahasa. Dengan logika yang sama, ekonomi Indonesia tidak hanya membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi, tetapi juga mesin-mesin yang membuat pertumbuhan itu lebih

sehat: produktivitas, logistik, kualitas SDM, jasa modern, kedalaman keuangan, digitalisasi, dan kepastian kebijakan. ([World Bank](#))

Itulah sebabnya World Bank menekankan bahwa untuk mencapai pertumbuhan lebih tinggi dan pekerjaan lebih baik, fokus harus bergeser ke **business-enabling reforms** dan lingkungan regulasi yang stabil. IMF menambahkan bahwa public investment yang lebih besar harus dibarengi efisiensi yang lebih tinggi, dan bahwa konvergensi penuh menuju high-income status memerlukan reformasi yang berpusat pada produktivitas, human capital, dan business environment. Jadi, persoalannya bukan hanya “berapa angka pertumbuhannya”, tetapi “struktur apa yang menopang angka itu.” ([Open Knowledge World Bank](#))

Dengan demikian, ada dua cara salah dalam membaca angka 5 persen. Cara salah pertama adalah berkata, “5 persen sudah cukup, jadi tidak perlu reformasi besar.” Cara salah kedua adalah berkata, “pokoknya harus 8 persen, berapa pun biayanya.” Pendekatan yang lebih tepat adalah memahami bahwa **5 persen belum cukup sebagai tujuan akhir, tetapi juga tidak boleh ditinggalkan sebagai landasan stabilitas.** Indonesia memerlukan jalan tengah yang lebih cerdas: menjaga kestabilan makro sambil meningkatkan kualitas struktur pertumbuhan agar laju yang lebih tinggi nantinya tidak menjadi rapuh. ([IMF](#))

5. Di mana letak hambatan sehingga 5 persen sulit berubah menjadi 6–8 persen?

Hambatan pertama adalah **produktivitas yang melemah**. World Bank secara eksplisit menyebutkan bahwa untuk mencapai visi 2045, Indonesia perlu membalik tren penurunan pertumbuhan produktivitas dari **2,3 persen menjadi 1,2 persen** selama 2011–2024. Bila produktivitas melambat, maka ekonomi akan semakin bergantung pada penambahan tenaga kerja dan modal untuk tumbuh. Masalahnya, strategi seperti itu tidak bisa menopang lompatan jangka panjang. Pada akhirnya, negara harus menghasilkan output yang jauh lebih besar dari setiap pekerja, setiap mesin, dan setiap rupiah investasi. Tanpa produktivitas,

pertumbuhan tinggi akan menjadi mahal dan sulit dipertahankan. ([World Bank](#))

Hambatan kedua adalah **return on investment** yang belum optimal. Indonesia sudah memiliki tingkat investasi yang tinggi cukup lama, tetapi hasilnya tidak selalu sebanding dengan akumulasi modal yang masuk. Ini terkait dengan kualitas proyek, birokrasi, logistik, kepastian regulasi, dan efisiensi pasar faktor. Bila imbal hasil investasi rendah, maka ekonomi dapat terus menyerap modal tanpa menghasilkan lompatan pertumbuhan yang sepadan. Itu sebabnya World Bank menekankan pentingnya mengurangi hambatan bagi sektor swasta dan menurunkan biaya kepatuhan regulasi, sementara IMF menekankan efisiensi investasi publik, bukan hanya skalanya. ([World Bank](#))

Hambatan ketiga adalah **pasar kerja dan kualitas pekerjaan**. BPS memang menunjukkan pengangguran menurun dan jumlah pekerja meningkat. Tetapi bila pekerjaan yang tercipta terlalu banyak terkonsentrasi pada sektor bernilai tambah rendah, maka pertumbuhan pendapatan rumah tangga akan tertahan. Indonesia bukan hanya membutuhkan lebih banyak pekerjaan, melainkan pekerjaan dengan pembelajaran keterampilan, formalitas yang lebih baik, dan produktivitas yang lebih tinggi. Tanpa itu, 5 persen pertumbuhan akan sulit diterjemahkan menjadi perluasan kelas menengah yang kuat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Hambatan keempat adalah **kedalaman sektor jasa modern**. Banyak orang masih berpikir bahwa pertumbuhan tinggi terutama datang dari manufaktur. Pandangan ini setengah benar. Dalam ekonomi modern, manufaktur yang kompetitif justru sangat bergantung pada jasa yang kompetitif: logistik, keuangan, teknologi informasi, pergudangan, pelabuhan, sertifikasi, desain, dan layanan profesional. World Bank menunjukkan bahwa reformasi sektor jasa dapat meningkatkan pertumbuhan Indonesia ke **5,3–5,5 persen pada 2026–2027**. Ini berarti

hambatan terhadap jasa bukan isu sampingan; ia adalah hambatan inti bagi pertumbuhan yang lebih tinggi. ([Open Knowledge World Bank](#))

Hambatan kelima adalah **biaya perdagangan dan logistik**. IMF menekankan bahwa investasi pada human capital dan logistics dapat menurunkan trade costs dan mendukung ekspor. Bahkan sebagai ilustrasi, IMF menunjukkan bahwa peningkatan skor logistik dari persentil 25 ke persentil 75 di antara negara emerging markets terkait dengan kenaikan ekspor barang sekitar **13 persen**, sementara peningkatan human capital pada kisaran yang sama dapat menaikkan ekspor jasa sekitar **9 persen**. Ini bukan sekadar detail teknis. Ini menunjukkan bahwa sebagian hambatan pertumbuhan Indonesia tidak terletak pada kurangnya pasar, tetapi pada mahalnya biaya untuk terhubung ke pasar tersebut. ([IMF](#))

Hambatan keenam adalah **kedalaman sistem keuangan**. World Bank 2025 mencatat total aset sektor keuangan Indonesia sekitar **70,6 persen dari PDB**, jauh di bawah Thailand, Malaysia, atau Vietnam. Kredit ke sektor swasta juga hanya sekitar **31,4 persen dari PDB** pada 2023, salah satu yang terendah di antara negara pembanding kawasan. Jika sistem keuangan dangkal, perusahaan—terutama usaha kecil dan menengah yang produktif—lebih sulit berekspansi, berinovasi, dan naik kelas. Jadi, 5 persen juga bisa menjadi cerminan bahwa transmisi tabungan menjadi investasi produktif di Indonesia belum sedalam yang seharusnya. ([World Bank](#))

6. Dalam kondisi apa 5 persen bisa dianggap cukup?

Walaupun saya berargumen bahwa 5 persen belum cukup untuk lompatan besar, ada kondisi tertentu di mana 5 persen bisa dianggap memadai. Pertama, jika Indonesia secara sengaja memilih jalur pembangunan yang lebih **bertahap dan berhati-hati**, maka pertumbuhan 5 persen bisa menjadi strategi yang rasional. Jalur ini menekankan stabilitas makro, kemajuan sosial bertahap, dan kehati-hatian fiskal, daripada mengejar lonjakan cepat yang berisiko. Dalam

dunia yang volatil, pendekatan seperti ini punya kelebihan: mengurangi kemungkinan boom-bust cycle. IMF sendiri menilai Indonesia cukup tangguh di tengah shocks yang merugikan, dan ini tentu bukan capaian kecil. ([IMF](#))

Kedua, 5 persen bisa dianggap cukup bila yang dikejar adalah **quality-adjusted growth**, bukan semata headline growth. Misalnya, bila pertumbuhan 5 persen itu disertai inflasi rendah, pengurangan kemiskinan yang konsisten, penurunan pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan institusi, maka nilainya jauh lebih besar daripada pertumbuhan 6–7 persen yang dibeli dengan inflasi tinggi, defisit besar, dan ketergantungan pada stimulus jangka pendek. Dalam arti ini, ada argumen kuat bahwa Indonesia tidak boleh terobsesi pada angka tinggi tanpa memperhatikan mutu fondasi ekonominya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketiga, 5 persen bisa cukup bila struktur demografis, produktivitas, dan global environment memungkinkan konvergensi pendapatan yang tidak terlalu cepat tetapi stabil. Namun data IMF justru menunjukkan bahwa untuk mencapai high-income status pada 2045, pertumbuhan yang dibutuhkan kira-kira berada sedikit di atas 5 persen, dan bisa lebih tinggi dalam asumsi lain. Artinya, sekalipun 5 persen tampak memadai dari sisi kestabilan, ia hanya “cukup” bila Indonesia rela menerima proses konvergensi yang lebih lambat atau target yang kurang ambisius. Jika ambisi 2045 tetap dipertahankan, maka 5 persen sulit disebut final. ([IMF](#))

Jadi, 5 persen bisa cukup **untuk suatu strategi gradualist**, tetapi tidak cukup **untuk strategi percepatan**. Dan tampaknya Indonesia secara resmi tidak memilih gradualism murni; Indonesia berbicara tentang Golden 2045, kelas menengah yang lebih besar, industrialisasi, hilirisasi, transformasi digital, dan lompatan produktivitas. Begitu ambisi itu diletakkan di meja, 5 persen menjadi angka yang baik—tetapi belum memadai. ([World Bank](#))

7. Apa yang harus dilakukan agar Indonesia bisa melampaui 5 persen secara sehat?

Langkah pertama adalah **meningkatkan produktivitas**, bukan sekadar mendorong permintaan. Dokumen World Bank dan IMF sama-sama menunjukkan bahwa inti dari pertumbuhan jangka panjang Indonesia terletak di sini. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui deregulasi yang memudahkan usaha, pengurangan biaya kepatuhan, kepastian aturan, dan peningkatan kompetisi. Tanpa perbaikan produktivitas, dorongan pertumbuhan tambahan akan cenderung bersifat sementara. ([Open Knowledge World Bank](#))

Langkah kedua adalah **memperbaiki kualitas investasi publik dan swasta**. IMF menekankan bahwa public investment yang lebih tinggi bisa membantu menutup sekitar sepertiga long-run income gap relatif terhadap benchmark high-income, tetapi hanya bila dilakukan secara efisien. IMF juga menegaskan bahwa fiskal bukan satu-satunya instrumen; reformasi struktural tetap wajib. Artinya, Indonesia perlu memperbesar investasi yang benar-benar menciptakan public capital produktif—jalan, pelabuhan, infrastruktur digital, pendidikan, kesehatan—serta memastikan proyek dipilih dan dieksekusi dengan kualitas tinggi. ([IMF](#))

Langkah ketiga adalah **mendalami perdagangan dan menurunkan biaya logistik**. IMF menyatakan bahwa pengurangan hambatan non-tarif dan investasi pada human capital serta logistics dapat mendukung ekspor dan memperluas comparative advantage Indonesia. Ini berarti kebijakan perdagangan tidak boleh hanya defensif. Indonesia perlu lebih “open for business” di tengah pergeseran rantai pasok global, sambil memastikan pelabuhan, bea cukai, jalan logistik, dan konektivitas antarpulau benar-benar mendukung kegiatan produksi. ([IMF](#))

Langkah keempat adalah **reformasi sektor jasa modern**. World Bank menunjukkan bahwa reformasi di sektor jasa dapat menaikkan pertumbuhan ke kisaran **5,3–5,5 persen** dalam beberapa tahun ke

depan. Ini adalah temuan yang sangat penting, sebab ia menyatakan secara implisit bahwa Indonesia punya ruang pertumbuhan tambahan bahkan tanpa “keajaiban” besar, asalkan melakukan reformasi yang tepat. Logistik, keuangan, digital services, professional services, dan layanan penunjang bisnis perlu dilihat sebagai arena reformasi utama, bukan sekadar pelengkap bagi manufaktur. ([Open Knowledge World Bank](#))

Langkah kelima adalah **membangun pekerjaan yang lebih baik**. Jika Indonesia berhasil menggeser tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif dan menaikkan kualitas upah, maka konsumsi rumah tangga akan lebih kuat, tabungan meningkat, dan kelas menengah membesar. Dalam jangka panjang, ini memperkuat basis pertumbuhan domestik. Pertumbuhan yang lebih tinggi tidak akan berkelanjutan bila ia tidak diterjemahkan ke kualitas pekerjaan. Karena itu, agenda pertumbuhan dan agenda ketenagakerjaan harus dibaca sebagai satu paket. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Langkah keenam adalah **mendigitalisasi ekonomi secara produktif**. World Bank dalam *Digital Foundations for Growth* menekankan pentingnya konektivitas, trust, dan GovTech sebagai fondasi bagi pertumbuhan masa depan Indonesia. Ekonomi digital terbesar di ASEAN tidak boleh berhenti pada belanja online. Ia harus berubah menjadi efisiensi logistik, interoperabilitas layanan publik, produktivitas UMKM, dan penciptaan layanan modern yang dapat diekspor. Jika digitalisasi menjadi produktif, maka Indonesia mempunyai peluang baru untuk melampaui 5 persen tanpa semata-mata bergantung pada komoditas atau stimulus konvensional. ([World Bank](#))

8. Tiga skenario untuk membaca masa depan Indonesia

Untuk menjawab pertanyaan “5 persen sudah cukup atau belum?”, mari kita bayangkan tiga skenario. **Skenario pertama** adalah Indonesia bertahan di sekitar 5 persen tanpa reformasi besar. Dalam skenario ini, ekonomi tetap stabil, kemiskinan turun perlahan, pengangguran

terkendali, tetapi produktivitas tidak melonjak dan kelas menengah tumbuh lambat. Ini adalah skenario “aman tetapi biasa-biasa saja.” Ia mungkin cukup untuk menjaga ketertiban, tetapi tidak cukup untuk lompatan sejarah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Skenario kedua adalah Indonesia mendorong pertumbuhan ke atas 6 persen dengan stimulus agresif, tetapi tanpa reformasi kualitas. Ini bisa menghasilkan percepatan sesaat, tetapi berisiko melahirkan ketegangan inflasi, pembengkakan defisit, proyek yang tidak efisien, dan pertumbuhan yang rapuh. IMF justru mengingatkan bahwa public investment yang dinaikkan harus dibarengi efisiensi dan revenue mobilization; tanpa itu, strategi percepatan bisa menjadi mahal dan tidak berkelanjutan. ([IMF](#))

Skenario ketiga adalah Indonesia menjaga stabilitas di sekitar 5 persen dalam jangka pendek, tetapi secara simultan melakukan reformasi produktivitas, jasa, logistik, human capital, digitalization, dan iklim usaha. Dalam skenario ini, 5 persen bukan titik puas, melainkan titik pijak. Lalu secara bertahap ekonomi bergerak ke 5,3–5,5 persen, dan mungkin lebih tinggi lagi, dengan kualitas pertumbuhan yang lebih baik. Inilah skenario paling masuk akal dan paling sehat. Bukan lonjakan instan, melainkan **escalator**, bukan **elevator**. ([Open Knowledge World Bank](#))

Dari tiga skenario ini, menurut saya skenario ketiga adalah jawaban terbaik atas pertanyaan user. Jadi, **5 persen belum cukup bila diperlakukan sebagai tujuan akhir, tetapi cukup sebagai platform awal untuk reformasi yang benar**. Yang berbahaya justru bila 5 persen dipakai sebagai alasan untuk menunda pembenahan. ([Open Knowledge World Bank](#))

9. Kesimpulan: 5 persen itu baik, tetapi belum memadai

Mari kita simpulkan secara langsung. Jika pertanyaan yang diajukan adalah: **apakah 5 persen cukup untuk membuat Indonesia tetap stabil, relatif tahan terhadap gejolak global, dan terus membaik**

secara bertahap? maka jawabannya adalah **ya, cukup**. Data 2025 menunjukkan pertumbuhan **5,11 persen**, pengangguran **4,74 persen**, kemiskinan **8,25 persen**, investasi tetap tumbuh kuat, dan cadangan devisa masih tinggi. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, ini adalah performa yang layak dihargai. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Tetapi jika pertanyaannya diubah menjadi: **apakah 5 persen cukup untuk membuat Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045, memperluas kelas menengah, memperbaiki kualitas kerja secara tajam, dan lolos dari middle-income trap?** maka jawabannya cenderung **belum cukup**. IMF memperkirakan kebutuhan pertumbuhan riil sekitar **5,3–6,3 persen** tergantung asumsi, sementara dokumen World Bank terkait Golden 2045 menyebut target pertumbuhan dipercepat **6–8 persen** dan menekankan pentingnya membalik penurunan produktivitas. Dengan tolok ukur itu, 5 persen tampak sebagai baseline yang baik, tetapi belum sebagai kecepatan yang memadai. ([IMF](#))

Maka jawaban paling jujur dan akademis adalah ini: **5 persen tidak boleh diremehkan, tetapi juga tidak boleh dipuja berlebihan**. Ia adalah angka yang baik untuk bertahan, tetapi belum memadai untuk bertransformasi secara penuh. Karena itu, perdebatan yang paling sehat bukanlah “5 persen bagus atau jelek,” melainkan “bagaimana mengubah fondasi 5 persen menjadi lintasan pertumbuhan yang lebih tinggi, lebih berkualitas, dan lebih inklusif.” Fokusnya harus bergeser dari sekadar angka menuju mesin penggeraknya: produktivitas, jasa modern, logistik, modal manusia, digitalisasi, kedalaman keuangan, dan kualitas tata kelola. ([Open Knowledge World Bank](#))

Dengan demikian, kalau saya harus menjawab pertanyaan ini dalam satu kalimat: **5 persen sudah cukup untuk menjaga Indonesia tetap berdiri tegak, tetapi belum cukup bila Indonesia ingin benar-benar berlari**. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Berikut **Glosarium** dan **Referensi** untuk makalah “**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Apakah 5 Persen Sudah Cukup?**” Istilah-istilah di bawah ini disusun sebagai **definisi operasional** yang konsisten dengan penggunaan dalam publikasi BPS, Bank Indonesia, IMF, dan World Bank. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Glosarium

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara.

BI-Rate

Suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang menjadi acuan utama arah kebijakan moneter.

Cadangan devisa

Aset luar negeri yang dimiliki bank sentral untuk menjaga stabilitas sektor eksternal, termasuk nilai tukar dan pembiayaan impor.

Defisit fiskal

Keadaan ketika total belanja negara lebih besar daripada total pendapatan negara dalam satu tahun anggaran.

Daya beli

Kemampuan rumah tangga atau masyarakat membeli barang dan jasa berdasarkan pendapatan dan tingkat harga yang berlaku.

Ekspor

Penjualan barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri.

Ekspor bersih

Selisih antara nilai ekspor dan nilai impor.

Good jobs / pekerjaan berkualitas

Pekerjaan yang produktif, relatif aman, memberikan pendapatan layak, dan membuka peluang mobilitas sosial.

Hilirisasi

Proses peningkatan nilai tambah melalui pengolahan bahan mentah atau komoditas primer menjadi produk antara atau produk akhir.

High-income country / negara berpendapatan tinggi

Kategori negara berdasarkan ambang tertentu dari pendapatan nasional bruto per kapita, sebagaimana digunakan dalam kerangka lembaga internasional.

Inflasi

Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode.

Inflasi inti

Inflasi yang mencerminkan tekanan harga yang lebih mendasar, setelah mengecualikan komponen yang sangat bergejolak dan harga yang diatur pemerintah.

Investasi

Penanaman modal untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, atau memperoleh manfaat ekonomi di masa depan.

Investasi publik

Belanja pemerintah untuk aset atau proyek yang menambah kapasitas ekonomi jangka panjang, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Jebakan pendapatan menengah (middle-income trap)

Situasi ketika suatu negara berhasil keluar dari kelompok berpendapatan rendah tetapi kemudian sulit naik menjadi negara berpendapatan tinggi karena produktivitas dan transformasi strukturnya melambat.

Ketahanan ekonomi

Kemampuan perekonomian untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan pulih dari guncangan.

Kurs / nilai tukar

Harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain.

Modal manusia (human capital)

Kualitas tenaga kerja yang tercermin dari pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kemampuan produktif.

Neraca perdagangan

Selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara dalam periode tertentu.

Nilai tambah

Peningkatan nilai ekonomi suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi, pengolahan, distribusi, atau inovasi.

PDB (Produk Domestik Bruto)

Nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam wilayah suatu negara selama periode tertentu.

PDB per kapita

PDB dibagi jumlah penduduk; digunakan sebagai indikator kasar rata-rata pendapatan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen investasi dalam PDB yang mencerminkan pengeluaran untuk aset tetap seperti bangunan, mesin, dan peralatan.

Produktivitas

Kemampuan menghasilkan output yang lebih besar atau lebih baik dari sejumlah input tertentu.

Prospek ekonomi

Perkiraan arah perkembangan ekonomi pada masa mendatang berdasarkan kondisi terkini, risiko, dan peluang.

Reformasi struktural

Perubahan kebijakan dan kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, daya saing, dan kualitas pertumbuhan.

Sektor jasa modern

Kelompok jasa bernilai tambah tinggi seperti logistik, teknologi informasi, jasa profesional, keuangan, pendidikan, dan kesehatan.

Stabilisasi makroekonomi

Serangkaian kebijakan untuk menjaga inflasi, pertumbuhan, kurs, fiskal, dan sistem keuangan tetap terkendali.

Transformasi struktural

Perubahan komposisi ekonomi dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor yang lebih modern, produktif, dan bernilai tambah tinggi.

Volatilitas pasar keuangan

Perubahan cepat dan tidak stabil pada harga aset, suku bunga, nilai tukar, dan arus modal.

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *November 2025: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah*. Rilis ini digunakan untuk data pasar kerja dalam pembahasan pertumbuhan dan kualitas pekerjaan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 2 Maret). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, 6 Februari). *Cadangan Devisa Januari 2026 Tetap Tinggi*. ([Bank Indonesia](#))

Rudy C Tarumingkeng: *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Apakah 5 Persen Sudah Cukup?*

Bank Indonesia. (2026, 19 Februari). *BI-Rate Tetap 4,75%: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Memperkuat Stabilitas Nilai Tukar Rupiah, dan Tetap Menjaga Inflasi dalam Sasaran.* ([Bank Indonesia](#))

International Monetary Fund. (2026, Januari). *Indonesia: Selected Issues.* Dokumen ini memuat simulasi kebutuhan pertumbuhan sekitar 5,3 persen dalam skenario dasar dan bisa sekitar 6,3 persen untuk pencapaian status negara berpendapatan tinggi pada 2045. ([IMF](#))

International Monetary Fund. (2026, Januari). *Indonesia: 2025 Article IV Consultation—Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Indonesia.* ([IMF eLibrary](#))

International Monetary Fund. (2026, 19 Januari). *World Economic Outlook Update, January 2026: Global Economy—Steady amid Divergent Forces.* ([IMF eLibrary](#))

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026, 15 Januari). *Realisasi Investasi 2025 Lampau Target, Hilirisasi Melompat 43,3 Persen.* ([bkpm.go.id](#))

World Bank. (2025, Desember). *Indonesia Economic Prospects.* Laporan ini digunakan untuk konteks makro, investasi, dan prospek pertumbuhan Indonesia. ([World Bank](#))

World Bank. (2025). *Golden Indonesia 2045: Unlocking Faster Growth and Job Creation.* Dokumen ini menekankan target pertumbuhan 6–8 persen dan pentingnya pembalikan tren pelemahan produktivitas. ([World Bank](#))

World Bank. (2026). *Running Faster, for Longer.* Laporan ini menyoroti reformasi untuk pertumbuhan lebih cepat dan penciptaan pekerjaan yang lebih baik. ([World Bank](#))

World Bank. (2026). *Services Competitiveness for Growth and Jobs in Indonesia.* Laporan ini menekankan pentingnya reformasi sektor jasa bagi pertumbuhan dan pekerjaan. ([Open Knowledge World Bank](#))

Rudy C Tarumingkeng: *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Apakah 5
Persen Sudah Cukup?*

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 3 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a656ea-0748-839f-a31a-f04772dc26c8>